



**PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**KEMANTREN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II - EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	5
BAB III - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	14
3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	14
BAB IV - PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suatu perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II di Tahun 2024, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa landasan hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024;
 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota

Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja ; dan

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

**BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada bulan Mei 2024, Kemantren Mantrijeron melakukan Review Rencana Strategis (Renstra) terhadap Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2024 dengan data di bawah ini :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2023	
			Awal	Review
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	384,67 poin	384,67 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Kategori hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	AA Nilai	A Nilai

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada Triwulan mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama dengan Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sesuai Review R dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN MANTRIJERON TAHUN 2023 - 2026**

No	Tujuan/Sasaran	Target				Realisasi	
		2023	2024	2025	2026	2023	2024
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	383,67	384,67	386	387	383,67	384,67
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	<i>Belum ada nilai</i>

Data dihimpun dari Review Renstra Tahun 2024

Pada Tahun 2024 ini terdapat perubahan komponen/parameter penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah. Pembobotan nilai capaian indikator dalam rencana aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah dikeluarkan oleh Perangkat Daerah selaku koordinator/*leading sector*. Kriteria dan mekanisme yang digunakan oleh koordinator/*leading sector* dalam masing-masing komponen/parameter penilaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dan masih berlaku. Hasil

penilaian dari Perangkat Daerah selaku koordinator/leading sector disampaikan kepada Inspektorat paling lambat akhir Oktober.

Tabel Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama Kemantren Mantrijeron Tahun 2023 – 2026 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2024, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Penggunaan dobel sistem penatausahaan keuangan (SIPKD dan SIPD) menyebabkan penambahan beban pekerjaan, yang berbanding terbalik dengan ketersediaan personil pengelola keuangan yang sesuai Analisis Jabatan.
3. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
4. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
5. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan :
 - a. penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
 - b. pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.
6. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.
7. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
8. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar.

10. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berikut ini.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOYAKARTA
KEMANTREN MANTRIJERON
TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada rencana Perangkat Daerah:

1. Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	Milai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	304,57 poin
2. Meningkatkan Volume Binaan Kemantren Mantrijeron	Hasil penilaian binaan kecamatan/besitas oleh Inspektori	5/5

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Subkomponen/Kegiatan) (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Rencana SKPD pada Akhir Rencana		Realisasi Capaian Kinerja Rencana SKPD dan RRPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD dan Tahun 2023	
					Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun 2024		Target Rencana SKPD 1W 6 tahun 2024		Realisasi Rencana SKPD 1W 6 tahun 2024		Tingkat Realisasi 1W 6 tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD dan tahun 2023					
					Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		PROGRAM PENGUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektori untuk Kemantren Mantrijeron	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektori untuk Kemantren Mantrijeron	A nilai	0,00	A nilai	0,00	A nilai	5.350.878.625,00	A nilai nilai	4.351.064.882,00	A nilai nilai	3.067.730.709,00	100%	70,52%		
		Perencanaan/Pengembangan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									30.828.000,00		14.375.000,00		13.292.500,00		92,48%	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	5.980.000,00	81,54%	3.080.000,00	81,54%	2.568.000,00	100,00%	96,88%		
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.870.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.870.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.725.000,00	100,00%	1.725.000,00	100,00%	1.724.000,00	100,00%	99,97%		
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.725.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Monev (Sesuai Rencana SKPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	13.110.000,00	32,82%	6.900.000,00	52,63%	5.994.000,00	100,00%	88,08%		
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	4.140.000,00	50,00%	2.070.000,00	50,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5.130.043.000,00		3.894.834.632,00		2.480.816.834,00		63,7%	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0,00	0 Orang/bulan	0,00	34 Orang/bulan	5.124.481.000,00	75,88%	3.868.302.532,00	75,88%	2.471.343.834,00	100,00%	63,91%		
	2	Penyusunan Perencanaan dan Pengadaan/Perbaikan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengadaan/Perbaikan Keuangan SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	2.489.000,00	30,00%	1.242.000,00	30,00%	1.180.000,00	100,00%	35,87%		
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	3.090.000,00	30,00%	1.725.000,00	30,00%	1.721.000,00	100,00%	99,77%		
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	30,00%	100.000,00	30,00%	300.000,00	100,00%	100,00%			

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	90,00%		90,00%	100,00%		
	5	Pengujian dan Penyusunan Baku Tanggapan Pemeriksaan		0,00	0,00	1.840.000,00	90,00%	1.656.000,00	90,00%	1.840.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Baku Tanggapan Pemeriksaan dan Teknik Kerja Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	90,00%		90,00%	100,00%		
	6	Kendali dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester/Trimester SKPD		0,00	0,00	3.100.000,00	90,00%	1.220.000,00	90,00%	1.720.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan/Trimester/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	10 Laporan	90,00%		90,00%	100,00%		
	7	Pengawasan Pelaksanaan dan Analisis Program Risiko dan Anggaran		0,00	0,00	1.540.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Analisis Program Risiko dan Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00%		0,00%	0,00%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6.238.000,00	3.100.000,00	2.700.000,00	88,97%		
	1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%
		Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		100,00%	100,00%		
	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	340.000,00	100,00%	340.000,00	100,00%	340.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		100,00%	100,00%		
	3	Kendali dan Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	340.000,00	100,00%	340.000,00	100,00%	340.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	100,00%		100,00%	100,00%		
	4	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	0,00	381.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0,00%		0,00%	0,00%		
	5	Revisi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	0,00	2.790.000,00	40,40%	1.220.000,00	40,40%	1.380.000,00	100,00%
		Jumlah Laporan Revisi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	11 Laporan	40,40%		40,40%	100,00%		
	6	Penyusutan Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	0,00	340.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Jumlah Laporan Penyusutan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0,00%		0,00%	0,00%		
	7	Penyusutan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	340.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusutan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00%		0,00%	0,00%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.090.000,00	2.392.800,00	1.587.000,00	66,35%		
	1	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian		0,00	0,00	1.040.000,00	40,00%	420.000,00	40,00%	550.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	40,00%		40,00%	100,00%		
	2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai		0,00	0,00	2.090.000,00	90,00%	1.840.000,00	90,00%	1.030.000,00	100,00%
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	90,00%		90,00%	100,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah						104.340.425,00	29.188.600,00	85.604.305,00	86,39%		
	1	Penyediaan Kebutuhan Material untuk Pemertan Anggaran Kerja		0,00	0,00	8.190.000,00	87,00%	8.280.000,00	87,00%	8.744.000,00	100,00%
		Jumlah Paket Komponen Material untuk Pemertan Anggaran Kerja yang Disediakan	3 paket	3 paket	4 paket	87,00%		87,00%	100,00%		
	2	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor		0,00	0,00	81.030.388,00	90,00%	74.980.000,00	90,00%	77.677.000,00	100,00%
		Jumlah Paket Fasilitas dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	4 paket	90,00%		90,00%	100,00%		
	3	Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga		0,00	0,00	8.094.000,00	100,00%	8.484.000,00	100,00%	8.580.000,00	100,00%
		Jumlah Paket Fasilitas Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket	4 paket	100,00%		100,00%	100,00%		

					0,00	0,00		29.257.500,00	51,27%	55.000.000,00	51,27%	14.384.750,00	100,00%	95,98%		
			Jumlah Paket Barang Cemas dan Penggantian yang Disediakan	0 paket	0 paket	4 paket			51,27%		51,27%		100,00%			
					0,00	0,00		75.708.000,00	48,54%	26.625.000,00	48,54%	27.288.000,00	100,00%	74,82%		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ruang Kios-kios dan Kios-kios SFTD	0 laporan	0 laporan	4 laporan			48,54%		48,54%		100,00%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								887.810.000,00		370.174.200,00		240.878.000,00		92,64%		
					0,00	0,00		2.800.000,00	91,00%	3.000.000,00	91,00%	2.800.000,00	100,00%	97,33%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	32 Laporan			91,00%		91,00%		100,00%			
					0,00	0,00		40.400.000,00	91,19%	40.000.000,00	91,19%	40.041.000,00	100,00%	90,49%		
			Jumlah laporan Penyediaan jasa Korpri/insan, sumber daya Air dan Listrik yang Dinyatakan	0 Laporan	0 Laporan	32 Laporan			91,19%		91,19%		100,00%			
					0,00	0,00		374.000.000,00	38,01%	218.371.200,00	38,01%	201.888.100,00	100,00%	83,46%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Mutasi Korpri yang Dinyatakan	0 Laporan	0 Laporan	32 Laporan			0,00%		38,01%		0,00%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								326.949.200,00		86.990.000,00		234.918.417,00		300,00%		
					0,00	0,00		27.100.000,00	48,21%	12.450.000,00	45,81%	11.220.000,00	100,00%	90,12%		
			Jumlah Pemeliharaan Perawatan atau Kembalikan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dipertahankan Pejabat	0 unit	0 unit	1 unit			48,21%		45,81%		100,00%			
					0,00	0,00		91.700.000,00	40,90%	17.040.000,00	45,90%	36.078.000,00	100,00%	70,71%		
			Jumlah Pemeliharaan Dinas Perawatan atau Lapangan yang Dipelihara dan Dipertahankan Paksi dan Perawatan	0 unit	0 unit	17 unit			40,90%		45,90%		100,00%			
					0,00	0,00		3.000.000,00	73,21%	7.175.000,00	73,21%	2.800.000,00	100,00%	27,87%		
			Jumlah Mobil yang Dipelihara	0 unit	0 unit	4 unit			73,21%		73,21%		100,00%			
					0,00	0,00		0.070.000,00	49,71%	6.290.000,00	49,71%	7.732.000,00	100,00%	83,30%		
			Jumlah Perawatan atau Mobil Lain-lain yang Dipelihara	0 unit	0 unit	23 unit			49,71%		49,71%		100,00%			
					0,00	0,00		100.900.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	107.388.372,00	100,00%	37.477,87%		
			Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Perawatan	0 unit	0 unit	6 unit			0,00%		100,00%		0,00%			
Rata-rata capaian kinerja												100,00%	1.377,02%			
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
					0,00	0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		277.432.000,00	90,00%	92,48%		
					0,00	0,00		100.000.000,00	99,00%	100.000.000,00	99,00%	92.807.000,00	100,00%	92,80%		
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Ruang Sektoral Ruang Strategis Sektoral Piasada Pemeliharaan Ruang Sektoral Ruang Strategis Sektoral	0 kegiatan	0 kegiatan	10 kegiatan			0,00%		99,00%		0,00%			
					0,00	0,00		100.000.000,00	94,23%	100.000.000,00	93,47%	92.807.000,00	99,19%	92,80%		
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Ruang Sektoral Ruang Strategis Sektoral Piasada Pemeliharaan Ruang Sektoral Ruang Strategis Sektoral	0 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan			0,00%		93,47%		0,00%			
					0,00	0,00		100.000.000,00	93,57%	100.000.000,00	93,57%	92.157.000,00	100,00%	92,16%		
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Ruang Sektoral Ruang Strategis Sektoral Piasada Pemeliharaan Ruang Sektoral Ruang Strategis Sektoral	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		93,57%		0,00%			
Rata-rata capaian kinerja												90,73%	92,48%			
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

Meningkatnya perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeran	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kecamatan Mantrijeran	Jumlah Swadaya Sosial Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	1.617.000.000 rupiah	0,00	1.454.026.000 rupiah	0,00	1.587.000.000 rupiah	4.578.444.345,00	793.905.000 rupiah	1.058.898.750,00	887.109.474 rupiah	1.285.537.453,00	124%	77,17%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									130.280.000,00	53.235.000,00	28.662.000,00	48,22%			
1	Peningkatan Kesadaran Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang Mengikuti Peringatan Bulan Pangan-Keluarga	0 keluarga	0 keluarga	0,00	0,00	1 keluarga	16.010.000,00	37,00%	3.220.000,00	37,00%	6.220.000,00	100,00%	100,00%	
2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan atau Menjalankan Usaha Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan yang Menwujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 keluarga	0 keluarga	0,00	1 keluarga	17.230.000,00	100,00%	17.230.000,00	100,00%	8.145.000,00	100,00%	35,40%		
3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang Mengikuti Pembentukan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	0 keluarga	0 keluarga	0,00	1 keluarga	21.760.000,00	40,00%	11.284.000,00	40,00%	11.520.000,00	100,00%	86,69%		
4	Pasokan Keluarga Tanggap Bencana	Jumlah keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	0 keluarga	0 keluarga	0,00	1 keluarga	26.230.000,00	45,00%	0,00	45,00%	0,00	45,00%	0,00%		
5	Peningkatan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Kemandirian Pemertanian Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Keluarga dalam Kemandirian pemertanian Menuju Keluarga Berkualitas	0 keluarga	0 keluarga	0,00	1 keluarga	38.216.000,00	47,81%	18.320.000,00	48,00%	1.980.000,00	188,19%	10,87%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									247.073.000,00	130.342.000,00	37.205.000,00	28,2%			
1	Penyediaan Timorita Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	1 Laporan	247.073.000,00	32,72%	130.342.000,00	18,81%	37.205.000,00	27,32%	29,80%		
Regulasi Pemberdayaan Kelurahan									4.137.793.345,00	1.428.749.000,00	1.179.047.463,00	82,48%			
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Jumlah keluarga/komunitas yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0 keluarga/komunitas	0 keluarga/komunitas	0,00	25 keluarga/komunitas	37.741.000,00	75,00%	27.239.000,00	75,00%	28.270.000,00	100,00%	96,26%		
2	Peningkatan Serta dan Pemasana Kelurahan Kelurahan Gedongtengah	Jumlah Serta dan Pemasana Kelurahan yang terlayani	0 Bulan	0 Bulan	0,00	12 Bulan	585.364.000,00	75,75%	264.271.100,00	45,20%	218.363.010,00	89,06%	81,17%		
3	Peningkatan Serta dan Pemasana Kelurahan Kelurahan Surodiponegoro	Jumlah Serta dan Pemasana yang terlayani	0 unit	0 unit	0,00	8 unit	515.686.118,00	30,66%	140.180.000,00	27,20%	143.131.031,00	100,00%	37,60%		
4	Peningkatan Serta dan Pemasana Kelurahan Kelurahan Martorejo	Jumlah Serta dan Pemasana Kelurahan yang terlayani	0 %	0 %	0,00	100 %	730.304.025,00	30,31%	85.284.000,00	22,88%	80.885.751,00	74,78%	52,04%		
5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Martorejo	Jumlah Pokorok dan Ormas yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 %	0 %	0,00	100 %	388.498.700,00	45,62%	280.498.000,00	44,38%	284.498.150,00	98,17%	88,14%		
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Surodiponegoro	Jumlah Pokorok dan Ormas yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokorok	0 pokorok	0,00	34 pokorok	756.102.000,00	35,47%	206.481.700,00	26,40%	161.521.000,00	86,62%	78,71%		
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongtengah	Jumlah Pokorok dan Ormas yang Melakukan	0 Bulan	0 Bulan	0,00	12 Bulan	675.762.700,00	30,89%	408.498.000,00	30,89%	280.918.000,00	100,00%	88,34%		

		Pembayaran Masyarakat di Rutan																
	4	Endang Purandari	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rutan		0,00	0,00			9.810.000,00	75,00%	4.098.000,00	76,00%	3.400.000,00	101,33%	96,00%			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rutan	0 Laporan		0 Laporan				75,00%		76,00%		101,33%				
			Pembayaran Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						86.430.000,00		46.485.000,00		44.120.000,00		94,91%			
	1	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rutan		0,00	0,00			27.790.000,00	75,00%	12.230.000,00	75,00%	18.000.000,00	107,54%	98,90%			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rutan	0 Laporan		0 Laporan				75,00%		75,00%		107,54%				
	2	Facilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0,00	0,00			38.470.000,00	85,00%	28.350.000,00	83,00%	26.680.000,00	100,00%	87,34%			
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan		0 Laporan				85,00%		83,00%		100,00%				
			Rata-rata capaian kinerja											98,34%	78,95%			
			Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sedang			
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Jumlah MER x nilai terbimbing dari 0 sampai 25	85,30 poin	0,00	84,50 poin	0,00	85,00 poin	261.850.000,00	85,00 poin	86.191.000,00	85,04 poin	87.714.750,00	100%	89,68%		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						144.830.000,00		34.015.000,00		33.851.250,00		89,53%			
	1	Koordinasi/tinggi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dukumen Koordinasi/tinggi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0,00	0,00			144.830.000,00	49,80%	34.015.000,00	52,00%	33.851.250,00	100,00%	89,53%			
			Jumlah Dukumen Koordinasi/tinggi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Laporan		0 Laporan				0,00%		52,00%		100,00%				
			Pelaksanaan Misi dan Penyelenggaraan yang Ditugaskan kepada Camat						116.830.000,00		54.181.000,00		53.863.000,00		89,41%			
	1	Pelaksanaan Misi dan Penyelenggaraan yang Ditugaskan kepada Camat	Jumlah Dukumen dan Laporan Pelaksanaan Misi yang Ditugaskan		0,00	0,00			28.290.000,00	80,29%	12.230.000,00	80,29%	12.230.000,00	100,00%	100,00%			
			Jumlah Dukumen dan Laporan Pelaksanaan Misi yang Ditugaskan	0 Dukumen		0 Dukumen				80,29%		80,29%		100,00%				
	2	Pelaksanaan Misi dan Penyelenggaraan yang Ditugaskan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi yang Ditugaskan		0,00	0,00			38.634.000,00	43,41%	41.940.000,00	43,43%	41.937.000,00	100,00%	96,34%			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi yang Ditugaskan	0 Laporan		0 Laporan				43,41%		43,43%		100,00%				
			Rata-rata capaian kinerja											100,01%	89,59%			
			Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTAMAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kecamatan Mantrijeron	Jumlah Pelanggaran Perda	24,00 pelanggaran	0,00	20,00	0,00	24,00	76.650.000,00	92	pelanggaranvv	86.875.000,00	9	pelanggaranvv	83.165.000,00	125%	86,29%
			Koordinasi Penerapan dan Pemagaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						76.650.000,00		38.375.000,00		33.565.000,00		87,01%			
	1	Koordinasi/tinggi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsi di Bidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/tinggi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsi di Bidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kepala Daerah		0,00	0,00			76.650.000,00	88,00%	38.375.000,00	88,00%	33.565.000,00	100,00%	87,01%			
			Jumlah Laporan Koordinasi/tinggi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsi di Bidang Penerapan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan		0 Laporan				88,00%		88,00%		100,00%				
			Rata-rata capaian kinerja											100,00%	87,01%			
			Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi			
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron		PROGRAM PENYELENGGARAAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kecamatan Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah permasalahan Kecamatan Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan	78,00 %	0,00	100,00 %	0,00	77,00 %	58.065.000,00	77% %	13.940.000,00	100% %	17.285.000,00	129%	93,88%		

		Kemantren Mantrijeron) x 100%												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								58.005.000,00		13.948.000,00		17.285.000,00	134%	
1	Facilitas Koordinasi dan Pembinaan (Sintak) Swadaya Kamtibmas Kawasan Kampung dan Keluarga Masyarakat	Jumlah org yg terlibat (pelaku, koord & pembinaan birek, swadaya, konsultasi) wadony 8,0%	0 orang	0 orang	80 orang			23.750.000,00	15,00%	3.500.000,00	15,00%	3.500.000,00	100,00%	100,00%
2	Pelembagaan Tugas Forum Kamtibmas Propinsi & Kacamatan	Jumlah Dokumen Tugas Pembinaan	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen			34.250.000,00	26,00%	10.375.000,00	40,00%	13.720.000,00	114,29%	132,24%
Rata-rata capaian kinerja												107,14%	116,12%	
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Total anggaran dari seluruh program							11.625.020.888,00	8.455.469.641,00	4.729.985.882,00					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)												99,73%	73,83%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)												Sangat Tinggi	Sedang	
Faktor Perbaikan Keterbatasan Kinerja	1. Kapasitas dan etika dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik, keprofesionalan dan integritas. 2. Adanya strategi dalam melakukan pemertahan di lingkungan dan kabupaten dengan pendekatan komunikasi. 3. Swadaya masyarakat dalam tugas. Pengumpul data yang (pelaku dan masyarakat) dan melakukan monitoring yang komprehensif dalam kinerja. 4. Bermitra dalam melakukan masyarakat yang di lingkungan. 5. Pengalihan masyarakat di luar batas dan bermitra dengan baik. Dokumen setiap hari oleh ASN dan Non ASN sebagai agen masyarakat. 6. Peningkatan sarana alat PB tahun 2023 telah ditubuhkan/terlaksana dengan dukungan 240 anggaran/anggaran dengan 177.4. 7. Tidak melakukan review setiap pada bulan Mei 2024.													
Faktor Penghambat Keterbatasan Kinerja	1. Adanya keterbatasan jumlah personel yang bertugas dengan beban kerja di lingkungan. 2. Bermitra baik dalam kegiatan berkoordinasi dengan anggota.													
Insidensi masalah yang diperlukan dalam urusan kerjanya	-													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	-													
												Tanggal:		2024
												Dibuat oleh		
												Materi Peningkatan		SAMANTREN MANI HUBUN
												AFFRIO SIANONO, S.Sos.		
												NIP. 191111111111111111		

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	384,67 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Kategori hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kemantren Mantrijeron pada Tahun 2024 memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
 - Kegiatan :
 - a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
 - Sub Kegiatan :
 - 1) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Gedongkiwo)
 - 2) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Suryodiningratan)
 - 3) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Kelurahan Mantrijeron)

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel

- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- 2) Evaluasi Kelurahan
- 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mantrijeron)
- 4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mantrijeron)
- 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Suryodiningratan)
- 6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Suryodiningratan)
- 7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gedongkiwo)

- 8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gedongkiwo)
- c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - 3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
 - 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - 5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron Tahun 2024, Kemantren Mantrijeron pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menambah untuk penyesuaian Gaji Pegawai, penambahan biaya tagihan listrik, retribusi sampah, kekurangan BBM untuk motor dinas kemantren, pemeliharaan AC, pemeliharaan computer, rehabilitasi kantor Kemantren Mantrijeron dan Kelurahan Mantrijeron, Konsultan Perencana Tahun N-1 untuk rehabilitasi kantor Kemantren Mantrijeron dan pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan pentas sepanjang tahun 2025.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren ada penambahan pada Kelurahan Suryodiningratan untuk pengadaan CCTV Kampung dan fasilitasi rapat PKK. Pada Kelurahan Gedongkiwo mengurangi Pembuatan Gapura karena lokasi lebar jalan kurang dari 3 meter dan menambah untuk pemeliharaan patung bergada dan pengadaan CCTV Kampung. Pada Kelurahan Mantrijeron mengurangi pemeliharaan SAH dan sisa honor Pelayan Masyarakat yang terdapat jabatan ganda serta menambah untuk pemeliharaan patung bergada dan pengadaan CCTV Kampung.

Selain itu, terdapat beberapa pengurangan anggaran kegiatan sesuai evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perubahan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan perubahan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi *outcomes* yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2024.

Yogyakarta, 02 Agustus 2024

Mantri Pamong Praja Mantrijeron



AFFERIO SUNARNO, S.Sos.
NIP. *****1998031002